



## Dintib Lakukan Penertiban di Kawasan Titik Nol

# Suryanto Kerahkan 40 Personel

*Upaya penertiban di kawasan nol kilometer mulai dilakukan Pemkot Yogyakarta. Mulai Rabu (27/6) sore, sebanyak 40 petugas gabungan mulai efektif melakukan operasi yustisi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Nol Kilometer.*

PETUGAS yang disiagakan akan melakukan tindakan represif jika masih didapati PKL berjualan di kawasan Nol Kilometer.

"Selama ini kami melakukan tindakan persuasif. Namun sesuai kesepakatan, setelah PKL diberi solusi berjualan di Selatan Beringharjo kami akan melakukan tindakan represif dan proses yustisi," jelas Kepala Dinas

Ketertiban (Dintib) Yogyakarta, Suryanto, Rabu (27/6).

Tak segan-segan, Suryanto menjelaskan jika masih saja ada PKL berjualan, barang dagangan akan disita sebagai barang bukti pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) larangan PKL berjualan di lokasi itu.

"Mereka akan diproses secara hukum dengan sanksi tindak pidana ringan



TRIBUN JOGJA/BRAMASTO ADHY

**EKSOTIK** - Kawasan titik Nol Malioboro tampak eksotik di malam hari. Pemkot akan mensterilkan kawasan tersebut dari PKL.

atas pelanggaran Perda," ujar dia.

Tak hanya dari Dintib, petugas yang akan terus

melakukan operasi penejagan Perda terdiri dari

■ Bersambung ke Hal 10

# Suryanto Kerahkan

Sambungan Hal 9

Polresta, Kodim dan Muspika. "Terutama selama liburan akan terus diintensifkan supaya kawasan itu steril dari PKL," katanya.

Menurut dia, toh Pemkot telah membantu mencari solusi agar PKL bisa berjualan selama liburan. Lokasi ditentukan di antara Pasar Sore dan Pasar Senthir selatan Beringharjo. Dengan demikian tidak ada alasan lagi PKL tetap *ngotot* berjualan di kawasan Nol Kilometer yang sudah ditetapkan sebagai kawasan larangan PKL sesuai Perda 26 tahun 2002.

"Harusnya pedagang mengerti dan pindah ke lokasi itu. Kalau masih nekad kita pakai cara repre-

sif," tukas dia.

Toh menurut dia, jika kawasan Nol Kilometer semrawut karena dipakai untuk berjualan serta parkir Yogyakarta akan kehilangan potensi wisata. Lantaran selama ini, kawasan itu digunakan pengunjung untuk menikmati suasana Malioboro.

"Masyarakat memanfaatkan itu sebagai ruang publik. PKL rugi sendiri kalau wisata Yogya tidak laku," ujar dia.

Direktur LSM Indonesia *Monitoring Procedure of Law* (Implaw), Chaniago Iseda selaku pendamping para pedagang Pasar Sore menanggapi keputusan Pemkot yang hendak menindak

tegas pedagang di lokasi larangan titik nol kilometer.

Menurutnya, jika pemerintah menawarkan lokasi diantara Pasar Sore dan Pasar Senthir, sebaiknya lebih dulu melakukan koordinasi dengan para pedagang di dua pasar itu. Pasalnya, kebijakan penempatan itu otomatis menyangkut lahan dan lokasi pedagang yang lebih dulu menempatnya.

"Sebaiknya pemkot memanggil pedagang dua pasar itu untuk rembukan. Jangan sampai setelah ditempatkan justru muncul keluhan," katanya, Rabu (27/6).

Menurutnya, pedagang Pasar Sore khususnya, selama ini juga terganggu peda-

gang liar di luar pasar itu. Mereka dipastikan tidak akan mau jika penempatan itu menambah kerugian bagi mereka.

Demikian juga mengenai perparkiran, pemerintah perlu mempertimbangkan bahwa kawasan itu membutuhkan area parkir. Jika para juru parkir dilarang dan tidak berada di lokasi pun, menurutnya masyarakat akan tetap datang dan parkir kendaraannya sembarangan di antara bangku taman di kawasan itu.

"Apakah akan mengusir wisatawan dan pengunjung itu juga? Atau mencari lahan parkir lain dekat kawasan itu," katanya. (rina eviana / yoseph hary)

1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input checked="" type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui
3. <b>Din. Ketertiban</b>			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
4. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 13 Mei 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005